

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Disadari atau tidak, pendidikan merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian manusia. (Innara, 2018) Perkembangan zaman yang semakin pesat menimbulkan banyak perubahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan manusia. Dari hari ke hari, minggu ke minggu pasti terjadi perubahan baik individu, kelompok ataupun masyarakat. Seperti perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Baik dari aspek ekonomi, budaya, politik dan pendidikan. Perubahan yang terjadi tak melulu kearah yang lebih baik bisa juga kearah sebaliknya. Bagaimanakah masyarakat dalam menghadapi perubahan tersebut. Apa yang bisa membantu masyarakat untuk menghadapi perubahan sosial. Melalui pendidikan tentunya dapat mempersiapkan sumber daya manusia seperti masyarakat untuk menghadapi perubahan yang melanda. (Yasir, 2022) Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dunia pendidikan dikenal sebagai salah satu investasi manusia dikarenakan hal ini bersifat menabung satu hal yang berguna dan bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk masa depan. Berjalannya suatu proses pendidikan haruslah didukung beberapa aspek. Selain kebutuhan tenaga pendidikan yang sangat dibutuhkan dalam menunjang proses pendidikan, salah satu aspek penting yang sangat perlu diperhatikan dalam berjalan lancarnya suatu sistem pendidikan yaitu aspek anggaran pendidikan yang tentu akan sangat dibutuhkan dalam menunjang kelancaran proses pendidikan yang akan diberikan kepada anak bangsa. Saat ini

masalah anggaran pendidikan selalu menjadi momok dalam hal penghambat proses jalannya pendidikan yang berkualitas bagi anak bangsa.

Pemerintah Indonesia dalam usaha membangun sumber daya manusianya berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendidikan dan Belanja Negara. Dana anggaran pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan. Namun terjadi dilema tersendiri terutama menyangkut semakin besarnya anggaran yang tersedia tapi tidak kunjung memberikan peningkatan yang diharapkan seperti jaminan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung utama pendidikan. (Juanda, 2021)

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) telah secara jelas dan tegas diatur bahwa salah satu cita-cita dan tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian hal ini ditegaskan kembali di dalam pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa adalah tugas negara untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dan untuk itu juga pada ayat (4) memprioritaskan anggaran bagi pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional tersebut. Demi membangun SDM, Pemerintah konsisten untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendidikan dan Belanja Negara. Dana anggaran pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan, diharapkan dapat namun masih menjadi dilema tersendiri terutama menyangkut besaran anggaran yang harus dipenuhi guna menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung utama pendidikan.

Makna dari pasal 31 UUD 1945 tersebut adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Namun, pada kondisi saat ini masyarakat Indonesia dihadapkan dengan berbagai persoalan mengenai pelayanan pendidikan serta hak-hak anak bangsa dalam memperoleh pendidikan yang layak. Semestinya pendidikan menjadi nomor satu yang harus dikedepankan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan majunya suatu bangsa, dengan mutu pendidikan yang tinggi dapat menentukan cerdasnya bangsa dan mampu menumbuhkan kreativitas berfikirnya anak-anak Indonesia sehingga bisa membangkitkan energi jiwa dalam mengisi pembangunan sebuah bangsa. Namun, di Indonesia akan menjadi sebuah mimpi besar bagi rakyat dan pemimpinnya untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan berkualitas sesuai dengan standar nasional. (Ulla, 2022)

Salah satu daerah di Indonesia yang merupakan daerah yang sering disebut daerah 3T (daerah terdepan, terbelakang, dan tertinggal). Maksudnya yaitu tertinggal yang berarti mempunyai kualitas rendah dalam pembangunan dan potensi Masyarakatnya yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam kanca Nasional. Kemudian terdepan dan terbelakang masuk pada letak geografis wilayah Indonesia. Wilayah ini pun tidak terlepas dari sistem pembangunan yang tidak merata, dikarenakan pembangunan pada aspek edukasi sebagai alasannya. Pendidikan yang tidak merata menjadi sorotan utama dari masalah-masalah yang lain. Daerah 3T belum sepenuhnya lapisan masyarakat yang dapat dijangkau, apalagi yang tinggal dipedesaan, wilayah terbelakang yang secara geografis sulit dijangkau.

Berdasarkan hal tersebut, berakibat pada ketidaksetaraan layanan pendidikan yang diterima pada usia sekolah Nasional. (Ulla, 2022). Menteri pendidikan Nadiem mengungkapkan dari blusukannya ke daerah-daerah 3T tersebut akan dievaluasi apa saja yang bisa dilakukan Kemendikbud untuk memperpendek jurang kesenjangan akses

pendidikan antar wilayah. Kemendikbud akan menjembatani berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Menurut Nadiem, akan mengalokasikan anggaran tambahan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp3 triliun bagi sekolah di daerah 3T. Menurutnya selama ini anggaran BOS tiap daerah dialokasikan dengan besaran yang sama. Kondisi demikian dipastikan akan merugikan sekolah-sekolah di daerah 3T karena biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan relatif lebih mahal. Selama ini dana BOS yang diterima sama semuanya. Merugikan sekali bagi sekolah-sekolah kecil dan di pinggirannya jika disamakan biaya per anaknya. Padahal di daerah 3T itu biaya konstruksi mahal dan barang-barang juga mahal. Jadi ini akan meningkat signifikan pada 2021. (Sindo, 2020)

Berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024, ada 62 kabupaten yang masuk kategori ini. Beberapa di antaranya adalah, Nias (Sumatera Utara), Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat), Musi Rawas Utara (Sumatera Selatan), Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat), Sumba Tengah & Alor (Nusa Tenggara Timur), Donggala (Sulawesi Tengah), Pulau Talibau (Maluku Utara), Nabire & Asmat (Papua), serta Teluk Wondoma & Pegunungan Arfak (Papua Barat). Dari beberapa daerah 3T tersebut, di provinsi Sumatera Barat terdapat daerah kepulauan Mentawai yang saat ini menjadi daerah 3T. Kabupaten kepulauan Mentawai memiliki 99 pulau dengan 3 pulau besar yang berpenghuni yaitu pulau Siberut, Sipora dan Pagai Utara. Lingkup wilayahnya terdiri dari 10 kecamatan, 43 desa, 450 dusun dengan total penduduk 86.692 jiwa. (Nofrizaldi, 2020)

Daerah Sipora merupakan salah satu daerah yang tingkat pendidikannya masih bisa dibilang rendah. Pada tahun 2020 Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit menyatakan sektor pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya di daerah Sipora Selatan masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disampaikan Wagub saat mengunjungi beberapa sekolah SMA dan SMK di kepulauan Sipora Kabupaten Kepulauan

Mentawai. Apalagi saat pandemi Covid-19 dan proses belajar mengajar dipindahkan ke rumah. Menurutnya tidak semua guru dan siswa memiliki *smartphone* dan mengakses jaringan internet, khususnya yang berada di desa terpencil kepulauan. Hal ini akhirnya membuat kegiatan belajar mengajar dari rumah tak bisa berjalan secara efektif. Dalam pandemi Covid-19 semua siswa belum diizinkan untuk masuk sekolah. Semua siswa dianjurkan untuk belajar melalui sistem daring. Tentunya sangat miris bagi di daerah pedalaman dan kepulauan. Kendalanya memang daerah sini tidak memiliki jaringan internet. (Redaksi, 2020)

Pada daerah sipora selatan ini memiliki beberapa sekolah mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang berjumlah 22 sekolah. Berikut data sekolah di daerah sipora selatan.

Tabel 1.1 Data sekolah di Pulau Sipora di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Sd	Smp	Sma
1	SD Negeri 01 Sioban	SMP Negeri 1 Sipora	SMA Negeri 1 Sipora
2	SD Negeri 02 Nemnemleleu	SMP Negeri 2 Sipora	SMA Negeri 2 Sipora
3	SD Negeri 03 Beriulou		SMK Negeri 1 Kepulauan Mentawai
4	SD Negeri 04 Bosua		SMA Swasta Plus Setia
5	SD Negeri 06 Saureinu		SMAK Cahaya Logos Mentawai
6	SD Negeri 07 Nemnemleleu		
7	SD Negeri 08 Matobe		
8	SD Negeri 09 Saureinu		
9	SD Negeri 10 Mara		
10	SD Negeri 14 Bosua		
11	SD Negeri 19 Matobe		
12	SD Negeri 20 Mara		
13	SD Negeri 25 Bosua		
14	SD Negeri 27 Beriulou		
15	SD Swasta Santo Yosep		

Dari 19 sekolah tersebut terdapat salah satu SMA Negeri 1 Sipora. SMA Negeri 1 Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan sekolah menengah atas negeri yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan fokus jurusan MIA dan IIS. SMA Negeri 1 Sipora selatan masih bisa dikatakan masih minim dalam hal kualitas pendidikan dikarenakan anggaran penunjangnya masih belum optimal dikelola, baik itu dari segi anggaran yang diterima pusat hingga dalam aspek pengelolaannya.

Permasalahan yang sering dialami yaitu kurangnya keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran sehingga dana yang ada tidak difungsikan dengan semestinya sehingga tidak diketahui bagaimana alur dalam penggunaannya. Padahal anggaran untuk daerah 3T ini sangat dibutuhkan untuk siswa dikarenakan kualitas SDM siswa di daerah ini masih sangat minim sehingga anggaran dana yang diberikan harus digunakan secara optimal. Sebagai penunjang kegiatan manajemen, sekolah memerlukan uang untuk melaksanakan rencana kegiatan sekolah yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Uang yang beredar dalam sekolah sudah sepatutnya dikelola dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku.

Masalah lainnya, untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di Dunia Usaha/Dunia Industri sekolah memerlukan kebutuhan *upgrading* peralatan, pemeliharaan gedung dan pemeliharaan prasarana pembelajaran yang menuntut tersedianya sumber dana rutin tahunan yang tepat. Selanjutnya, sekolah sudah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) namun tidak sesuai dengan besarnya kebutuhan sekolah. Terakhir SMA Negeri 1 Sipora belum dapat memaksimalkan potensi yang ada di sekolah dalam mengembangkan sumber-sumber dana alternatif. Sebagaimana dengan teori yang digunakan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab IX Pasal 62 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengklasifikasikan biaya pendidikan menjadi biaya

investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Kualitas pelayanan pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh baik buruknya mutu pengelolaan keuangan sekolah. Maka dari itu sangat diperlukan pengelolaan anggaran.

Pengelolaan anggaran pendidikan, dalam undang-undang no 20 tahun 2003 di jelaskan bahawa anggaran pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya (input) baik berupa barang maupun berupa uang yang di tunjukkan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar. Anggaran pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sumber-Sumber anggaran di sekolah ialah anggaran dari Pemerintah, anggaran dari orang tua siswa, dan anggaran dari pemerintah, suatu anggaran memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, agar segala aktifitas di lembaga tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pentingnya anggaran bagi suatu lembaga pendidikan adalah anggaran merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh suatu lembaga pendidikan, dengan adanya anggaran suatu lembaga pendidikan dapat mengelola lembagannya dengan maksimal, baik dalam pengadaan sarana dan prasarana maupun dalam peembayaran gaji guru ataupun dalam hal lainnya, bendahara sekolah berperan penting dalam melakukan pengelolaan anggaran pendidikan. Bendahara sekolah berkewajiban dalam menentukan anggaran sekolah, cara mendapatkan anggaran untuk infrastuktur sekolah serta penggunaan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Tugas bendahara sekolah dalam pengelolaan angaran seperti pengelolaan untuk perencanaan perkiraan , pengelolaan memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaan, pengelolaan kerjasama denghan pihak lain, penggunaan keuangan dan mencari sumber danannya.

Seorang dalam melakukan pengelolaan anggaran harus mempunyai pikiran yang kreatif dan dinamis. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang dalam melekukan pengelolaan anggaran berhubungan dengan masalah anggaran yang sangat

penting dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Adapun strategi yang harus dimiliki oleh seorang pengelola anggaran antara lain strategi planning (strategi perencanaan), strategi management (strategi dalam mengelola), strategi thinking (strategi merumuskan tujuan dan hasil). Strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan anggaran ialah menganalisis kebutuhan dan kemampuan sekolah, mengklasifikasikan sumber anggaran dan alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas, menjalani kerjasama dengan masyarakat dan lembaga lembaga lain, menjalani kerjasama dengan orang tua wali murid, memanfaatkan bantuan dari masyarakat dan lembaga-lembaga lain untuk meningkatkan mutu sekolah dan kebutuhan atau kegiatan sekolah yang tidak di angarkan pada alokasi anggaran yang bersumber dari pemerintah. Tatacara pengelolaan anggaran di sekolah yang pertama ialah dengan pengumpulan data, seterusnya dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data berkaitan dengan rencana kebutuhan sekolah serta ketersediaan anggaran yang akan digunakan. (Suhaimi, 2021)

Sekolah memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang yang beredar dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan keuangan sekolah yang optimal memaksa sekolah melakukan proses manajemen keuangan sekolah dengan sebaik mungkin. Proses manajemen keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan oleh stakeholder yang baik pula. Stakeholder yang baik berupa pihak-pihak internal maupun eksternal sekolah yang berperan aktif dalam pengelolaan keuangan sekolah. Keaktifan stakeholder akan menunjang proses pengelolaan keuangan sekolah yang akan berpengaruh pada jumlah uang yang optimal. Jumlah uang yang optimal seperti uang yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah. Jika jumlah uang yang berlebih dapat mengurangi efisiensi dari pengelolaan keuangan sekolah, sedangkan jumlah uang yang kurang mengurangi kinerja dari sumber daya lain, seperti kinerja guru, karyawan, pemanfaatan fasilitas sekolah dan yang lainnya. (Yusrizal & Lubis, 2020)



Pengelolaan keuangan sekolah didasari pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana, pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggungjawaban. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan prinsip keadilan dan efisiensi karena kedua prinsip tersebut erat kaitannya dengan tahapan dalam pengelolaan keuangan sekolah pada tahap perencanaan dan realisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan. Prinsip keadilan berkaitan dengan kesempatan yang diberikan seluas-luasnya kepada peserta didik dalam menerima pelayanan pendidikan, sedangkan prinsip efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya dalam memberikan pelayanan pendidikan melalui sekolah.

Berkaitan dengan permasalahan perencanaan dan realisasi tersebut, perlu disadari bahwa pengelolaan keuangan sekolah mempunyai peran yang sangat menentukan kelancaran terealisasinya program kegiatan sekolah. Meskipun dana pendidikan bukan satu-satunya faktor keberhasilan, tanpa adanya dana yang mencukupi maka pendidikan yang berkualitas tinggi sulit tercapai. Dengan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif diharapkan mutu pendidikan di sekolah masih dapat ditingkatkan meskipun dengan anggaran terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud melaksanakan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan sekolah yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Sipora sebagai salah satu daerah 3T (daerah terdepan, terpendek, dan tertinggal) apakah telah dilakukan dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sekolah

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di daerah 3T (daerah terdepan, terpendek, dan tertinggal) pada SMA Negeri 1 Sipora ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan sekolah di daerah 3T (daerah terdepan, terpendek, dan tertinggal) pada SMA Negeri 1 Sipora

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun dalam lima bab. Adapun isi dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjabarkan tentang landasan teori, review atas penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman terkait dengan penelitian ini, serta kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menyajikan metode penelitian yang dilakukan yang berisi jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai hasil data yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan alat dan analisis data sehingga akan menjawab rumusan masalah.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dari pembahasan penelitian secara keseluruhan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang bersifat membangun.

